

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi salah satu teknologi yang berkembang dengan sangat pesat, sehingga berperan besar dalam meningkatkan pengetahuan terutama pada bidang pemerintahan. Perkembangan teknologi akan membuka peluang dan tantangan untuk menciptakan, mengakses, mengolah, dan memanfaatkan informasi secara tepat dan akurat. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintahan telah berinisiatif membuat kebijakan dalam memanfaatkan teknologi untuk membangun *Electronic Government for Good Governance* yang terintegrasi mulai dari tingkat pemerintahan daerah hingga ke pusat (Aminudin and Putra 2014). Hal tersebut menyebabkan *e-Government* atau pemerintahan berbasis elektronik menjadi semakin berperan penting bagi semua pengambil keputusan.

Namun pemerintah saat ini masih identik dengan *paper-based administration* atau masih menggunakan komunikasi tertulis untuk kegiatan administrasi seperti surat menyurat. Kegiatan pengurusan surat termasuk suatu kegiatan penting yang harus dilakukan karena akan menjadi sarana pencapaian tujuan. Menurut prosedur pengurusannya, surat dibedakan menjadi dua yaitu surat masuk dan surat keluar (Hidayat and Jumiati 2016).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah (Sekda). Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dengan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

Untuk urusan manajemen surat menyurat dalam Dinas Kesehatan masih dilakukan secara manual ke dalam media buku besar, karena masih menggunakan media, maka sering terjadi masalah data surat tidak tercatat. Pencarian data surat masuk dan keluar masih dilakukan manual dengan cara data surat dicek satu persatu ke dalam buku besar, sedangkan untuk mengetahui status surat masuk sudah atau belum terdisposisi dan surat keluar sudah atau belum ditanda tangan harus bertanya langsung kepada petugas yang bersangkutan (Nugroho 2014).

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dalam butir c menyatakan : Bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi dan mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara dan khususnya Pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan di lembaga negara, Pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan harus dilakukan dalam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu.

Pada bagian administrasi Dinas Kesehatan masih menerapkan proses pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara manual dengan berdasarkan sistem penyimpanan kode nomor. Sistem manual yang digunakan membuat pengelola kurang teliti sehingga adanya kesalahan dalam penyimpanan arsip. Hal ini menyebabkan banyak arsip yang belum terkelola dengan baik, dan menyebabkan penemuan kembali arsip menjadi kurang efisien atau bisa dikatakan juga penemuan kembali arsip akan memakan waktu yang cukup lama dan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan bahwa cara penemuan kembali arsip yang baik adalah dengan waktu kurang dari 1 menit (Wirawanty 2014).

Menurut Wirawanty (2014) tata kelola yang baik ditunjukkan dengan angka kecermatan yang tidak lebih dari 0,5 %. Semakin rendah angka kecermatan, membuktikan semakin baik penyelenggaraan arsip.

Terdapat aktifitas mengolah dokumen surat masuk dan surat keluar yang masih dalam bentuk kertas sehingga mengakibatkan mudah rusak dan hilang. Selain itu prosedur manual ini masih banyak menggunakan kertas yang dapat menambah biaya pengeluaran untuk pemakaian yang berlebihan. Dalam 2 minggu mampu menghabiskan 1 rim kertas hanya untuk proses pengarsipan (Ramadhana 2015).

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mencoba mengusulkan **Aplikasi Monitoring Surat Menyurat Berbasis *Mobile* dengan Menggunakan Klasifikasi Jenis Surat** dengan tujuan agar pencatatan data surat dapat dilakukan lebih mudah. Selain itu pengarsipan surat dapat dilakukan dengan cara digital agar para pegawai lain bisa melakukan pencarian data surat, dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan lebih mudah dan cepat. Untuk proses surat masuk terdisposisi dapat diketahui dan proses surat keluar yang telah atau belum ditanda tangan juga dapat diketahui. Aplikasi dibangun berbasis *mobile* agar dapat diakses kapan pun dan dimana pun secara mudah dan cepat, serta dapat membantu para staf dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan di Dinas

Kesehatan. Pengambilan data dalam perancangan aplikasi dilakukan berdasarkan prosedur surat masuk dan surat keluar di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam institusi negara tidak lepas dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan syariah Islam. Konsep ukhuwah, konsep tausiyah, dan konsep khalifah merupakan landasan pembangunan institusi Islam yang berbentuk Negara. Seperti terdapat dalam Firman Allah SWT : (Rahmawati 2018)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya (Q.S Al-Baqarah [2]: 282).

Dalam ayat tersebut, administrasi (*al-idârah*) merupakan *mashdar* (infinitif) dari kata *adâra asy-syay'a yudiruhu idârat[an]*, yang artinya mengatur atau menjalankan sesuatu (*al-Qabathi, Ushûlul idârah asy-Syar'iyah*) (Rahmawati 2018). Dengan demikian, ayat tersebut memiliki peranan administrasi sebagai tulis-menulis, catat mencatat (pembukuan). Karena dengan mengetahui dan memahami sistem administrasi Islam diharapkan pelaksanaan sistem Administrasi Negara di Indonesia memiliki peranan yang dapat memberikan manfaat serta kemaslahatan umat bagi kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang suatu aplikasi monitoring surat menyurat di Dinas Kesehatan agar menjadi proses yang terkomputerisasi?
2. Bagaimana mengembangkan aplikasi surat menyurat berdasarkan klasifikasi arsip yang ada di Dinas Kesehatan?

3. Bagaimana tinjauan Islam terhadap teknologi sebagai kegiatan administrasi dalam memonitoring surat menyurat di Dinas Kesehatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Merancang aplikasi monitoring surat menyurat di Dinas Kesehatan dengan sistem pengarsipan dokumen secara digital.
2. Mempermudah kegiatan dalam klasifikasi surat masuk dan surat keluar.
3. Untuk mengetahui tinjauan Islam dalam perkembangan teknologi sebagai kegiatan administrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Memudahkan dalam surat menyurat di Dinas Kesehatan dengan terkomputerisasi.
2. Memudahkan dalam mengetahui/mentracking surat masuk dan surat keluar berdasarkan klasifikasi surat.
3. Menambah wawasan mengenai syariat Islam dalam pengembangan teknologi sebagai kegiatan administrasi.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan aplikasi dikembangkan dengan berbasis *mobile*, menggunakan Android Studio dan *database* MySQL.
2. Pengambilan data dalam perancangan aplikasi berdasarkan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) surat masuk dan surat keluar di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
3. Aplikasi dikembangkan berdasarkan klasifikasi kode jenis dalam kegiatan surat masuk dan surat keluar di Dinas Kesehatan.
4. Pengujian aplikasi dilakukan oleh pegawai di Dinas Kesehatan DKI Jakarta, yang beralamat di Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat.
5. Dalam penelitian ini, tidak mencakup implementasi penggunaan langsung aplikasi di Dinas Kesehatan.